

# AKUNTABILITAS GEREJA DALAM PERSPEKTIF ALKITABIAH DAN STEWARDSHIP THEORY (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur)

Franchisca Sukmawati  
Sri Pujiningsih  
Nujmatul Laily

Universitas Negeri Malang  
[salomefranchisca@gmail.com](mailto:salomefranchisca@gmail.com)

**Abstract:** *This research has purpose to understand of practice financial accountability at X church in East Java. This research use qualitative approach. Procedure and collecting data in this research by using technique interview, documentation, and hidden observation. Interview conducted for regent, herdsman session, management and congregation. Result of this research show : 1) Vertical financial accountability or for God conducted by manage cash church honestly and full of responsibility. 2) Horizontal financial accoountability form by publish financial report.*

**Keywords:** *Horizontal Accountability, Vertical Accountability, Stewardship Theory, Church*

Gereja termasuk dalam organisasi nirlaba yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Sumber penerimaan gereja berasal dari uang persembahan jemaat. Penerimaan gereja yang berasal dari jemaat seperti: persembahan, persepuluhan dan sumbangan.

Persembahan dari jemaat yang diterima gereja memiliki jumlah yang besar. Salah satu contoh, Gereja X di salah satu kota di Jawa Timur dalam satu kali ibadah menerima persembahan kurang-lebih Rp 500.000,00. Gereja X dalam satu minggu melakukan 6 kali kegiatan ibadah. Jumlah penerimaan yang berasal dari jemaat dikalikan dengan kegiatan ibadah cukup besar yakni Rp 3.000.000,00 (Rp 500.000,00 x 6 kegiatan ibadah). Dalam waktu satu bulan, jumlah penerimaan uang gereja sebsar Rp 12.000.000,00 (Rp 3.000.000,00 x 4 minggu). Perhitungan tersebut belum ditambahkan dengan persembahan persepuluhan.

Penerimaan gereja yang besar tanpa disertai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadikan penyebab permasalahan pengelolaan

keuangan ataupun penyalahgunaan uang gereja. Skandal keuangan yang terjadi di Gereja *City Harvest* Singapura dan Gereja Silo Jemaat GPM Romean merupakan contoh permasalahan pengelolaan keuangan gereja akibat tidak disertai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan unsur dalam menciptakan *Good Governance* atau tata kelola yang baik. Mardiasmo (2009: 20) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, pemimpin gereja dalam hal keuangan gereja diharapkan memiliki integritas yang tinggi, seperti tidak mencuri uang, tidak menipu orang untuk mendapatkan uang, tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun untuk memperoleh

uang, dan tidak mau menerima suap. Pemimpin gereja diharuskan menjaga tangannya agar tetap bersih dalam hal keuangan dan bersedia setiap saat untuk diaudit dari awal sampai akhir pelayanannya. Hal tersebut disampaikan oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel 12:3-5 menegaskan perilaku pemimpin gereja yang benar dalam hal pengelolaan keuangan gereja:

(3) Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.” (4) Jawab mereka: “Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.” (5) Lalu berkatalah ia kepada mereka: “TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku.” Jawab mereka: “Dia menjadi saksi.”

Halim dan Kusufi (2014: 15) menjelaskan akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Laporan keuangan sebagai komponen dalam akuntansi merupakan alat akuntabilitas (pertanggungjawaban) bendahara gereja kepada jemaat. Terdapat 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas, namun ada 2 tujuan dan fungsi yang dapat disesuaikan dalam mengelola keuangan gereja. Tujuan laporan keuangan menurut Harun (2009: 54), pertama, sebagai petunjuk adanya kepatuhan pelaksanaan tugas. Berdasarkan fungsi kepatuhan, laporan keuangan memastikan bahwa suatu agen sektor publik melaksanakan tugas atau aktivitas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui penggunaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Fungsi kepatuhan memastikan bendahara gereja untuk mengelola keuangan gereja dengan penuh tanggung jawab. Kedua, tujuan laporan keuangan menurut Harun (2009: 54-55) adalah

sebagai laporan akuntabilitas dan alat evaluasi. Laporan keuangan bermanfaat untuk: memonitor dan mengevaluasi kinerja manajer sektor publik. Laporan keuangan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan gereja berfungsi sebagai alat pengawasan dan alat evaluasi jemaat atas kinerja bendahara gereja dalam mengelola keuangan gereja.

### **Stewardship Theory**

Donaldson (1989) dan Davis (1991) dalam Raharjo (2007: 39) menjelaskan bahwa dalam *stewardship theory* “manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi”. Berdasarkan teori *Stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Selain itu, teori *Stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi.

Usumah (2010: 5) dalam Lestari (2012: 20) “*stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain”.

Bendahara gereja sebagai *steward* memiliki fungsi pengelola sumber daya dan jemaat sebagai *principal* merupakan pemilik sumber daya. Kesepakatan yang terjadi antara bendahara gereja (*steward*) dan jemaat (*principal*) berdasarkan kepercayaan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari organisasi sektor publik (organisasi gereja) adalah memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (jemaat).

### **Akuntabilitas dalam Ilmu Pengetahuan**

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. Mardiasmo (2009: 20) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bastian (2010: 385) memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk

menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan akuntabilitas menurut Pujiningsih (2013: 20) adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi amanah atau yang mendelegasikan kewenangan puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. Jadi, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen (*agent*) atau pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelolah sumber daya kepada publik (*principal*) atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2009: 21). Pada organisasi gereja, akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sedangkan, akuntabilitas horisontal dalam organisasi gereja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada jemaat, pengurus gereja yang lain, serta gembala sidang gereja.

### **Akuntabilitas dalam Perspektif Alkitabiah**

Pemimpin gereja dalam hal keuangan gereja diharapkan memiliki integritas yang tinggi, seperti tidak mencuri uang, tidak menipu orang untuk mendapatkan uang, tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun untuk memperoleh uang, dan tidak mau menerima suap. Pemimpin gereja diharuskan menjaga tangannya agar tetap bersih dalam hal keuangan dan bersedia setiap saat untuk diaudit dari awal sampai akhir pelayanannya. Nabi Samuel dalam 1 Samuel 12:3-5 menegaskan perilaku pemimpin gereja yang benar dalam hal pengelolaan keuangan gereja:

(3) Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.” (4) Jawab mereka: “Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan

engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.” (5) Lalu berkatalah ia kepada mereka: “TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku.” Jawab mereka: “Dia menjadi saksi.”

Nabi Yesaya juga mengungkapkan hal yang sama dengan Nabi Samuel di dalam Yesaya 32:17 “Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman untuk selama-lamanya”. Selain itu, Sepuluh Perintah Allah (*Ten Commandments*) dalam Keluaran 20:15 “Jangan Mencuri.” dengan tegas Tuhan memerintahkan kepada umatNya untuk tidak mencuri. Berdasarkan kedua ayat tersebut, bendahara gereja diajarkan untuk melakukan kebenaran dalam hal pengelolaan keuangan. Bendahara gereja dituntut untuk mengelolah keuangan gereja dengan kebenaran atau tidak melakukan pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan uang gereja.

Yesus dalam khotbahNya yang ditulis oleh Rasul Markus dalam Markus 13:34 mengatakan “Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.” Dalam Markus 13:34, Yesus memerintahkan untuk setiap orang yang menerima kepercayaan untuk melakukan setiap tugas yang diterimanya dengan penuh tanggung jawab, apabila tuannya atau pemimpinnya datang untuk menilai kinerjanya orang tersebut telah siap. Bendahara gereja yang diberi kepercayaan untuk mengelolah keuangan gereja juga harus melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab.

Hal yang sama diungkapkan dalam 1 Petrus 3:15 yang mengatakan: “Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.” 1 Petrus 3:15 mengajarkan bahwa bendahara gereja harus menjaga amanah yang telah diterimanya. Bendahara gereja diminta untuk mengelolah keuangan gereja dengan penuh tanggung jawab, sehingga ketika jemaat meminta

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja bendahara telah siap untuk diaudit.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis penelitiannya adalah studi kasus yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek penelitian tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu.

### Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat tanpa turut berperanserta dalam kegiatan yang ada dilokasi penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan hadir dilokasi penelitian.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Gereja yang berada di salah satu wilayah Kabupaten di Jawa Timur. Gereja X di Jawa Timur merupakan gereja cabang dari Gereja X di Surabaya. Gereja X di Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pemilihan karena keistimewaan dalam pengelolaan keuangan gereja. Hak otonom (hak untuk mengelolah sendiri seluruh persembahan dari jemaat) inilah yang membedakan Gereja X di Jawa Timur dengan Gereja cabang yang lain. Gereja cabang yang lain menyerahkan seluruh uang jemaat kepada Gereja X di Surabaya untuk dikelola. Sehingga, Gereja cabang yang lain (jemaat maupun pengurus) memiliki ketergantungan keuangan serta tidak mengetahui penerimaan dan penggunaan uang gereja tersebut. Hal ini berbeda dengan Gereja X di Jawa Timur yang mengelolah keuangan sendiri, sehingga pengurus dan jemaat mengetahui penerimaan, pengeluaran, kebutuhan dan sumber penerimaan lainnya.

### Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai akuntabilitas keuangan Gereja X di Jawa Timur.
2. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen berupa laporan

keuangan dan dokumen lain sebagai penunjang penelitian ini.

### Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah

1. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian Indriantoro dan (Supomo, 2012: 152). Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan bendahara gereja dan pengurus, gembala sidang, dan jemaat. Pertanyaan yang diajukan pada proses wawancara dapat berkembang untuk menggali lebih jauh jawaban partisipan.
2. Dokumentasi  
Herdiansyah (2012: 143) mendefinisikan dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Dokumen yang dimaksudkan adalah dokumen mengenai laporan keuangan gereja, atau dokumen lain yang dapat menunjang penelitian seperti: struktur organisasi gereja dan lain-lain.
3. Observasi  
Teknik observasi menurut Purhantara (2010: 87) adalah “pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya ... Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda, atau kejadian (obyek) daripada metode wawancara”. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hidden observation* yakni mengamati kejadian atau perilaku yang terjadi di lokasi penelitian tanpa sepengetahuan informan.

### Analisis Data

1. *Thematic Analysis* (Analisis Tematik)  
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik adalah cara mengidentifikasi tema-tema terpolo dalam suatu fenomena. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola secara jelas. Hanurawan (2012: 92) teknik analisis tematik adalah teknik analisis makna

berdasar tema-tema yang menonjol yang berhubungan dengan kategori-kategori yang ada dalam tujuan penelitian. Menurut Boyatziz (1998) dalam Poerwandari (2009: 173):

“analisis tematik adalah proses yang dapat digunakan dalam hampir semua metode kualitatif, dan memungkinkan penerjemah gejala/informasi kualitatif menjadi data kualitatif seperlu kebutuhan peneliti. Analisis tematik merupakan proses pengkode informasi, yang dapat menghasilkan data tema, model tema atau indikator kompleks, kualifikasi biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal diantara atau gabungan yang telah disebutkan.”

2. *Data Display* (penyajian data)  
Data disajikan dalam bentuk uraian singkat dalam teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini bertujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami.
3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)  
Penarikan kesimpulan didasarkan atas data yang diperoleh dari sumber, kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **Pengecekan Keabsahan Temuan**

Alat yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi pada penelitian kualitatif ini adalah teknik analisa data triangulasi. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Purhantara, 2010: 102). Teknik analisa data triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Triangulasi metode  
Triangulasi metode merupakan teknik untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Peneliti dalam menguji kebenaran penerapan konsep akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan Gereja X di Jawa Timur melalui metode yang berbeda, yakni: observasi dan wawancara.
2. Triangulasi sumber  
Triangulasi sumber merupakan cara menguji data dan informasi dengan cara mencari data dan informasi yang sama kepada lain subyek. Peneliti dapat menanyakan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda.
3. Triangulasi Situasi

Triangulasi situasi yaitu pengujian informasi dari penuturan seorang responden/subjek jika dalam keadaan orang lain dibanding dengan dalam keadaan sendirian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tiga bendahara gereja secara bersama-sama.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pengertian Akuntabilitas Keuangan Menurut Bendahara**

Berdasarkan Firman Tuhan atau Alkitab, bendahara Gereja mendefinisikan akuntabilitas keuangan sebagai usaha yang dilakukan untuk menghindari tindakan pencurian uang jemaat. Seperti yang disampaikan bendahara sebagai berikut:

“kalau pertanggungjawaban dan transparansi yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya buat menghindari pikiran-pikiran yang negatif *mbak*. Sepuluh Perintah Allah itu kan juga ada “Jangan Mencuri” jelas sekali, jadi kita memaknai atau kalau *mbak* tadi maksud atau pengertiannya pertanggungjawaban dan transparansi itu usaha supaya kita *nggak* mencuri uang jemaat.”

Akuntabilitas keuangan menurut bendahara gereja adalah bentuk dari penyampaian atas kinerja yang dilakukan dalam mengelola uang, selain itu sebagai media komunikasi antara bendahara dan jemaat mengenai kondisi keuangan gereja. Seperti yang disampaikan bendahara sebagai berikut:

“jadi gini *mbak*, kalau *nyatat* uang jemaat itu tanggungjawab kita sebagai bendahara gereja, kalau ditaruh di warta itu *biar* jemaat tahu kalau kita *benerngelola* uang mereka. Jadi misalnya kas habis untuk ini itu jemaat juga tahu, menghindari pikiran-pikiran negatif dari jemaat, jangan sampai mereka mikir kita ngambil atau *nilep* uang mereka.”

### **Bentuk Akuntabilitas Keuangan Menurut Bendahara**

Bentuk akuntabilitas keuangan dari bendahara gereja kepada Tuhan dilakukan dengan cara mengelola uang jemaat secara jujur dan didasari takut akan Tuhan. Seperti yang disampaikan bendahara sebagai berikut:

“sebenarnya di Alkitab *kan* juga *nggak* ada yang jelas harus seperti ini, ya didasari *aja* dengan rasa takut akan Tuhan terus kita *kan* diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya *mbak*, jadi bentuk tanggungjawab kita soal keuangan gereja ya kita lakukan dengan jujur *aja*. *Kan* *nggak* ada kita buat laporan keuangan ke Tuhan kalau kita kelola keuangan seperti ini, jujur lah kuncinya.”

Laporan keuangan yang tercantum dalam warta jemaat merupakan bentuk akuntabilitas keuangan kepada jemaat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bendahara gereja dengan prinsip “di manusia beres, di hadapan Tuhan juga pasti beres.” Seperti yang disampaikan bendahara sebagai berikut:

“Ya itu tadi kita pakai warta. Prinsipnya dimanusia harus beres dulu di Tuhan pasti beres, kadang *kan* mereka bertanya mana laporanmu? *Sampek* kursipun saya tutup, saya *catet* nilainya berapa karena prinsip itu tadi, bukan yang *gak usah dicatet* ini urusan sama Tuhan. Saya *gak tau* ayatnya dimana tapi ya ini prinsip yang saya pegang. Tapi saya kira itu sudah kejujuran dari diri kita sendiri, jadi ketika ada orang tanya kita punya catatan detailnya.”

Bendahara gereja tidak membuat laporan akuntabilitas kepada pihak eksternal atau pemberi sumbangan karena pemberi sumbangan tidak meminta dan tidak memerlukan laporan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan bendahara sebagai berikut:

“*Nggak* ada *mbak*, *nggak* pernah minta juga, cuma ada *catetannya* aja. Saya bersyukur orang-orang disini ini tutup mata kalau memberi, *udahlah* urusanmu sama Tuhan. Misal ada yang *nyumbang* untuk pembangunan, mau uangnya dipakai untuk yang lain ya terserah, pokoknya aku *ngasihnya* buat Tuhan. Kadang orangnya *mikir*, *udahlah* aku *nyumbang* juga untuk gereja, terserah mau dipakai apa *aja* pokoknya buat gereja buat Tuhan. Ini kan di desa *mbak*, jadi *nggak* terlalu kritis *kayak* di gereja di kota.”

## PEMBAHASAN

### Akuntabilitas Keuangan Gereja

Bastian (2010: 385) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas terdiri dari 5 elemen, salah satu dari elemen akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan atau finansial (*financial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Akuntabilitas dibagi menjadi 2 macam, yakni: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Mardiasmo (2009: 21):

“Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.”

Akuntabilitas vertikal dalam lingkup organisasi gereja adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada jemaat.

Komponen *good governance* yang menjadi bagian dari akuntabilitas adalah transparansi. Mahmudi (2013: 17-18) memaknai transparansi sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud dalam transparansi seperti tentang aktivitas, program, dan kebijakan. Transparansi merupakan wujud kebebasan jemaat dalam memperoleh informasi penggunaan uang gereja. Jemaat sebagai pemangku kepentingan berhak mengetahui besar penerimaan dan pengeluaran uang gereja. Transparansi merupakan bentuk

pengendalian dan pengawasan aliran kas gereja yang dapat dilakukan oleh jemaat atas kinerja bendahara gereja.

### Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas keuangan vertikal dalam lingkup organisasi gereja adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yuesti (2013: 112) menjelaskan bahwa akuntabilitas kepada Tuhan merupakan “wujud ucapan syukur karena manusia telah menerima berkat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya secara rohani.” Berkat dapat diartikan sebagai rejeki, kebahagiaan, kepercayaan, dan sebagainya.

“kalau pertanggungjawaban dan transparansi yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya buat menghindari pikiran-pikiran yang negatif *mbak*. Sepuluh Perintah Allah itu kan juga ada “Jangan Mencuri” jelas sekali, jadi kita memaknai atau kalau *mbak* tadi maksud atau pengertiannya pertanggungjawaban dan transparansi itu usaha supaya kita *nggak* mencuri uang jemaat.”

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara gereja mendefinisikan akuntabilitas keuangan sebagai usaha yang dilakukan untuk menghindari tindakan pencurian uang jemaat. Berdasarkan pada Sepuluh Perintah Allah (*Ten Commandments*) dalam Keluaran 20:15 “Jangan Mencuri.” Keluaran 20:15 merupakan patokan bagi bendahara gereja untuk melakukan akuntabilitas keuangan agar tetap berkenan di hadapan Tuhan dan merupakan wujud ucapan syukur bendahara kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan gereja.

Bentuk akuntabilitas keuangan kepada Tuhan adalah mengelola kas gereja dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Dasar Firman yang digunakan bendahara gereja sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada Tuhan ada dalam Kolose 3:23 “Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Bentuk akuntabilitas kepada Tuhan tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan atau mengelola keuangan dengan segenap hati seperti melakukan untuk Tuhan merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh bendahara gereja.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara gereja, seperti berikut:

“sebenarnya di Alkitab *kan* juga *nggak* ada yang jelas harus seperti ini, ya didasari *aja* dengan rasa takut akan Tuhan terus kita *kan* diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia *ya mbak*, jadi bentuk tanggungjawab kita soal keuangan gereja *ya* kita lakukan dengan jujur *aja*. *Kan* *nggak* ada kita buat laporan keuangan ke Tuhan kalau kita kelola keuangan seperti ini, jujur lah kuncinya.”

Sedangkan akuntabilitas horisontal dalam organisasi gereja merupakan bentuk pertanggungjawaban bendahara gereja kepada jemaat, pengurus, gembala sidang dan pemberi sumbangan. Akuntabilitas keuangan menurut Departemen Agama RI (2006: 5) dalam Ula (2014: 11) menfokuskan pada integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Bendahara gereja memaknai akuntabilitas keuangan sebagai bentuk penyampaian bendahara kepada jemaat atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas menurut bendahara gereja merupakan media komunikasi bendahara kepada jemaat mengenai kondisi keuangan gereja. Melalui laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, jemaat dapat mengetahui kondisi keuangan gereja setiap bulan. Seperti penjelasan bendahara gereja seperti berikut:

“jadi gini *mbak*, kalau *nyatat* uang jemaat itu tanggungjawab kita sebagai bendahara gereja, kalau ditaruh di warta itu *biar* jemaat tahu kalau kita *benerngelola* uang mereka. Jadi misalnya kas habis untuk ini itu jemaat juga tahu, menghindari pikiran-pikiran negatif dari jemaat, jangan sampai mereka mikir kita *ngambil* atau *nilep* uang mereka.”

Pemaknaan akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan bendahara gereja untuk menghindarkan jemaat dari pikiran negatif dan menyampaikan kepada jemaat bahwa uang kas gereja digunakan untuk keperluan gereja dan bukan untuk keperluan pribadi bendahara gereja. Selain itu akuntabilitas melalui laporan keuangan merupakan media penghubung bendahara kepada

jemaat mengenai kondisi keuangan gereja, baik buruk kondisi keuangan gereja, atau ada-tidak kas gereja saat ini.

Laporan keuangan yang tercantum dalam warta jemaat merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan bendahara gereja kepada jemaat. Prinsip “di manusia beres, di Tuhan pasti beres” sesuai dengan 2 Korintus 8:20-21 yang berkata “(20) Sebab kami hendak menghindarkan hal ini: bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. (21) Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya dihadapan Tuhan, tetapi juga dihadapan manusia.”

“Ya itu tadi kita pakai warta. Prinsipnya dimanusia harus beres dulu di Tuhan pasti beres, kadang *kan* mereka bertanya mana laporanmu? *Sampek* kursi pun saya tutup, saya *catet* nilainya berapa karena prinsip itu tadi, bukan yang *gak usah dicatet* ini urusan sama Tuhan. Saya *gak tau* ayatnya di mana tapi *ya* ini prinsip yang saya pegang. Tapi saya kira itu sudah kejujuran dari diri kita sendiri, jadi ketika ada orang tanya kita punya catatan detailnya.”

Prinsip bendahara gereja, berdasarkan hasil wawancara di atas, sesuai dengan 2 Korintus 8:21. Tuhan mengetahui setiap pekerjaan manusia, namun manusia memerlukan bukti fisik dari pekerjaan yang telah dipercayakan. Berdasarkan ayat tersebut, bendahara gereja berendapat bahwa bentuk akuntabilitas keuangan yang dapat dilakukan kepada jemaat dengan memberikan laporan keuangan yang tercantum dalam warta jemaat.

Tujuan dari laporan keuangan entitas nirlaba menurut IAI (2015: 45.2) adalah “menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.” Salah satu tujuan laporan keuangan entitas nirlaba menyediakan informasi yang relevan kepada pemberi sumber daya (pemberi sumbangan), anggota (jemaat), dan pihak lain. Bendahara gereja mempublikasikan laporan keuangan melalui warta jemaat untuk menyediakan informasi yang relevan kepada anggota. Namun, bendahara gereja tidak pernah membuat laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban kepada pemberi sumber daya atau pemberi sumbangan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bendahara

gereja.

“*Nggak* ada *mbak*, *nggak* pernah minta juga, cuma ada *catetannya* aja. Saya bersyukur orang-orang di sini ini tutup mata kalau memberi, *udahlah* urusanmu sama Tuhan. Misal ada yang nyumbang untuk pembangunan, mau uangnya dipakai untuk yang lain *ya* terserah, pokoknya aku *ngasihnya* buat Tuhan. Kadang orangnya *mikir*, *udahlah* aku *nyumbang* juga untuk gereja, terserah mau dipakai apa *aja* pokoknya buat gereja buat Tuhan. Ini kan di desa *mbak*, jadi *nggak* terlalu kritis kayak di gereja di kota.”

Usumah (2010: 5) dalam Lestari (2012: 20) “*stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain”. Bendahara gereja menilai bahwa kedua pemberi sumbangan itu percaya bahwa sumbangan yang diberikan digunakan untuk keperluan gereja. Alasan lain adalah para pemberi sumbangan memberikan untuk Tuhan dapat menjadi indikator bahwa kedua orang tersebut merasa tidak memerlukan laporan pertanggungjawaban dari bendahara gereja.

### Model Akuntabilitas Gereja

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas vertikal didasari oleh *stewardship theory*. *Stewardship theory* mengasumsikan bahwa manusia dapat dipercaya atau amanah. Selain *stewardship theory*, penelitian ini menggunakan dasar kitab suci atau Alkitab sebagai pedoman dalam memahami akuntabilitas vertikal. Alkitab menafsirkan manusia sebagai hamba Allah yang terdapat dalam Roma 11:36 yang mengatakan “Sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya!”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orientasi hidup manusia harus berguna bagi pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Salah satu contoh pekerjaan yang diamanahkan kepada manusia adalah mengelolah keuangan gereja. Mengelolah keuangan gereja dengan jujur dan amanah untuk kemuliaan Tuhan sebagai bentuk pengabdian hamba kepada sang tuan adalah bentuk akuntabilitas vertikal kepada Tuhan.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang mendasari praktik bisnis selama ini.

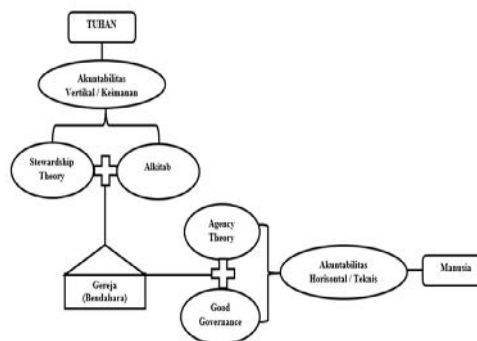


Prinsip utama teori keagenan menyatakan keberadaan hubungan kerja antara *agen* (manajer) yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan atas nama *principal* (pemilik atau investor). Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Investor sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil investasi dalam perusahaan, sedangkan manajer atau agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan yang menyertai hubungan tersebut. Perbedaan kepentingan tersebut membuat kedua pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Hubungan *principal* dan *agen* mengarah pada kondisi asimetri informasi, di mana *agen* memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Perbedaan kepentingan *principal* dan *agen* untuk memperbesar keuntungan masing-masing menyebabkan *agen* untuk menyembunyikan beberapa informasi dari *principal*. Konsep *good governance* atau tata kelola yang baik menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Munculnya teori *good governance* dilatarbelakangi oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Penyelenggaraan *good governance* harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BPKP adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Laporan akuntabilitas yang diterbitkan manajemen terdapat unsur transparansi, sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi adalah bagian dalam akuntabilitas.

Teori keagenan mengasumsikan manusia adalah individu yang rasional. Konsep *good governance* dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara *agen* dan *principal*. Sehingga akuntabilitas horisontal dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan dan konsep *good governance*.



**Gambar 5.4 Model Akuntabilitas Gereja**

Sumber: Olahan Pribadi

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas keuangan gereja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban kepada Tuhan dilakukan dengan cara mengelola kas gereja dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Sikap tersebut merupakan wujud ucapan syukur bendahara kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk mengelolah keuangan gereja. Bentuk akuntabilitas keuangan kepada Tuhan tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan atau mengelola keuangan dengan segenap hati seperti melakukan untuk Tuhan merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh bendahara gereja.
2. Akuntabilitas horisontal merupakan bentuk atau upaya penyampaian bendahara kepada jemaat atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Publikasi laporan keuangan dalam warta jemaat merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan bendahara gereja kepada jemaat. Akuntabilitas melalui laporan keuangan merupakan media penghubung bendahara kepada jemaat mengenai kondisi keuangan gereja, baik buruk kondisi keuangan gereja, atau ada-tidak kas gereja saat ini.

## Keterbatasan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu wawancara hanya dapat dilakukan dengan dua orang bendahara karena satu bendahara yang lain menolak untuk melakukan wawancara dengan peneliti. Sehingga tidak didapat informasi mengenai pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Gereja X di Jawa Timur yang dilakukan bendahara tersebut.

## Saran

Pada subbab ini ijin penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Sebagai pihak yang berwenang, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian bagi organisasi-organisasi tempat ibadah, khususnya organisasi gereja. Pemberian dana bantuan bagi gereja-gereja di desa diperlukan untuk perkembangan suatu gereja. Tujuan dari bantuan pendanaan adalah memberikan jemaat gereja untuk dapat beribadah pada gedung gereja dengan nyaman, sehingga jemaat gereja juga dapat merasakan keadilan dan toleransi dari pemerintah daerah.
2. Bagi Bendahara Gereja X di Jawa Timur  
Bagi bendahara gereja, penyajian laporan keuangan yang tercantum dalam warta jemaat yang telah dilakukan sebaiknya diperjelas untuk mempermudah jemaat memahami informasi yang hendak disampaikan oleh bendahara. Selain itu, mempertahankan sikap yang jujur dan amanah sebagai bentuk dari akuntabilitas tindakan kepada jemaat.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini terbatas pada akuntabilitas keuangan organisasi gereja, penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh unsur dalam *good governance* pada organisasi gereja. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada organisasi gereja dengan aset terbatas, sehingga penelitian selanjutnya dapat memilih lokasi penelitian pada organisasi gereja dengan kekayaan aset yang lebih besar

## DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Departemen Agama RI. 2006. *Akutabilitas dan Good Governance*. Dalam Afila Nurlaily Ula (Ed), *Akutabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban* (hlm. 5). Malang: FE Universitas Negeri Malang.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep, dan aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta:Salemba Empat.
- Hanurawan, Fattah. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Psikologi*. Surabaya: KPKM Universitas Airlangga.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Empat.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2007. *Alkitab*. Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:UIN Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Poerwandari, Kristi. 2009. *Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3.
- Pujiningsih, Sri. 2013. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usumah. 2010. *Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Dalam Vivi Lestari (Ed), *Bukti Mengenai Dampak Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Audit Fee* (hlm. 20). Jakarta: FE UIN Syarif Hidayatullah.
- Yuesti, Anik. 2013. Akuntansi dan Akuntabilitas pada Komunitas Kristen di Bukit Doa Nusa Dua Bali. *Jurnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya*, 19 (2): 105-114.